



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF YANUAR
2. Jabatan : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
3. NHK : 68211

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.405.040.884**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/216 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 956.160.000
2. Bangunan Seluas 98 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 448.880.884

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **956.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA RX-K 135CC Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GK 1,5 RS CVT CKD MOBIL PENUMPANG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V 1.5T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. MOTOR, HONDA CB650RAP IN M/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 291.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **630.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **3.370.223.100**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **6.361.263.984**

III. HUTANG **Rp.** **90.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **6.271.263.984**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.